

**STUDI PEMIKIRAN M. AMIEN RAIS TENTANG
RELASI ISLAM DAN NEGARA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

HARYANTO KURNIAWAN
NIM. 03370322

PEMBIMBING :

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH., M. Hum.**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Haryanto Kurniawan

Kepada yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Haryanto Kurniawan
NIM : 03370322
Judul Skripsi : STUDI PEMIKIRAN M. AMIEN RAIS TENTANG
RELASI ISLAM DAN NEGARA

Sudah dapat diajukan guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Rabbi'ul Awwal 1431 H.
01 Maret 2010 M.

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP: 196802021993031003

Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Haryanto Kurniawan

Kepada yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Haryanto Kurniawan
NIM : 033770322
Judul Skripsi : STUDI PEMIKIRAN M. AMIEN RAIS TENTANG
RELASI ISLAM DAN NEGARA

Sudah dapat diajukan guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Rabbi'ul Awwal 1431 H.
01 Maret 2010 M.

Pembimbing II


Ahmad Bahiej, SH., M. Hum.
NIP. 197506152000031001



PENGESAHAN SKIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN. 02/K. JS. SKR/PP. 009/52/2010

Skipsi/Tugas akhir dengan judul : STUDI PEMIKIRAN M. AMIEN RAIS TENTANG RELASI
ISLAM DAN NEGARA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Haryanto Kurniawan
NIM : 03370322
Telah dimunaqasyahkan pada : 09 Maret 2010
Nilai Munaqasyah : A (95.00)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP: 196802021993031003

Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M. Si
NIP: 196301311992031004

Penguji II

Drs. Ahmad Patiroy, M. Ag
NIP: 196203271992031001

Yogyakarta, 23 Maret 2010



Prof. Dr. Eudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP: 196004171989031001

MOTTO

” Syukuri apa yang sudah ada, tetap bertawakal ”



**” Jangan Pernah Berputus Asa Hanya Karena Satu
Kegagalan”**



**” Waktu Yang Telah Berlalu, Tak Kan Terulang Dimasa
Mendatang”**



” Optimislah Kita Mampu Membuat Satu Perubahan”

Halaman Persembahan

Skripsi ini Penyusun Persembahkan Kepada:

Ibu, Ayah, Keluarga besar di Magelang

**Almamater Tercinta Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	-
ت	Ta	t	-
ث	tsa,	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	-
ح	ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)

ر	ra'	f	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	
ش	Syin	sy	-
ص	sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	-
ف	fa'	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wau	w	-

هـ	ha'	h	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof (Tetapi tidak dilambangkan apabila terletak diawal kata)
ي	ya'	y	-

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----َ	Fathah	a	a
-----ِ	Kasrah	i	i
-----ُ	Dammah	u	u

Contoh :

كتب → kataba

سئل → su'ila

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a – i
وَ	Fathah dan wau	au	a – u

Contoh :

كيف → kaifa

حول → haula

c. **Vocal Panjang (maddah) :**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan ya	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qala

قيل → qila

رمى → rama

يقول → yaqulu

3. **Ta' Marbut{ah**

a. Transliterasi *ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

b. Transliterasi *ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun , transliterasinya adalah "h".

Contoh :

طلحة → talhah

- c. Jika *ta' marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh :

روضة الأطفال → *raudatul atfal* atau *raudah al-atfal*

المدينة المنورة → *al-Madinatul Munawwarah* atau

al-Madinah al-Munawwarah

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

5. Kata Sandang " ال "

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ ال ”. Namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ ال ” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh :

الرَّجُل → *ar-rajulu*

السَّيِّدَة → *as-sayyidatu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh :

القَلَم → *al-qalamu*

البَدِيع → *al-badi'u*

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيئ → *syai'un*

امرت → *umirtu*

النوء → *an-Nau'u*

7. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول → *Wama Muhammadun illa Rasul*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام
على أسرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد...

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. yang hanya karena rahmat, hidayah dan inayah-Nyalah, penyusun dapat menyelesaikan kripsi ini sampai akhir. Shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada Rosulullah Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari alam jahiliyah menuju jalan Allah, dengan Islam.

Skripsi ini tidak akan pernah mencapai tahap penyelesaian tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dorongan secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu perkenankan penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum., selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Bahiej, SH., M. Hum., selaku Pembimbing II, yang telah

memberikan arahan, kritik dan saran kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap dosen dan staf karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membimbing penyusun selama menjalani masa studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Endang, SE. selaku staf Tata Usaha Jurusan Jinayah Siyasah, terima kasih atas bantuan dan kebaikannya.
6. Ayahanda, Bp. Iswadi M. S dan Ibunda tercinta, Ibu Siti Asyiyah, yang dengan restu dan do'anya, telah memberikan segala yang beliau miliki, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kakakku Heni Handayani dan adikku Laely Fajriani yang telah memberikan motivasi dan inspirasi tersendiri bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Keponakan yang lucu-lucu Bintang, Ela semoga tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua
8. Sodaraku sekaligus temanku Nurcahyo yang tak lelah atas waktu, nasehat serta masukannya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman JS '03 (Mughist, Damar, Amin, Dimas, Wildan, dkk) dan staf 'AIR Managemen' (P.Iqbal, P Arief, Mas Reza Adhitya, dkk) atas semua kritik dan sarannya.
10. Bapak Viva Iskandar, Bapak Ragil yang selalu menaungi penulis selama di Yogyakarta. Semoga do'a beliau menjadi amal ibadah dan mendapat rahmat Allah SWT. Amin

11. Sahabatku Reza Adhitya yang telah meminjamkan perlengkapannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Radite, Fajar (oeban), Ahpri, Mbak Puji, Wahyu Praha, Zuberh kalian adalah sahabat terbaikku.
13. Komunitas anak Nologaten, semoga tetap utuh sampai tua nanti dan menjadi saudara selamanya.
14. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Sebetulnya masih banyak sekali yang belum disebutkan satu persatu, namun karena keterbatasan yang ada. Sehingga penyusun hanya dapat berdoa semoga segala bantuan, dorongan, bimbingan, pelayanan, saran dan kritik yang membangun tersebut mendapat balasan dari Allah SWT, dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian, khususnya bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, 15 Rabi'ul Awwal 1431 H.
01 Maret 2010 M.

Penyusun

Haryanto Kurniawan
NIM. 03370322

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
ABSTRAKS	xxi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA DALAM ISLAM

A. Konsepsi Negara Dalam Islam	18
B. Bentuk Negara Dalam Pandangan Islam.....	21
C. Revitalisasi Konsep Negara Dalam Islam.....	31

BAB III. PEMIKIRAN M. AMIEN RAIS TENTANG RELASI ISLAM DAN NEGARA

A. Biografi M. Amien Rais	36
B. Dinamika pendidikan, sosial – politik M. Amien Rais	37
C. Karakteristik pemikiranM. Amin Rais.....	41

BAB IV. ANALISIS TERHADAP RELASI ISLAM DAN NEGARA

A. Pandangan M. Amien Rais tentang Islam dan Negara.....	61
B. Latar Belakang Pemikiran M. Amien Rais dalam Relasi Islam dan Negara.....	73
C. Pandangan M. Amien Rais Mengenai Islam dan Neagra dalam Perspektif Fiqh Siyasa.....	76
D. Konsistensi Relasi Islam, Negara dan Penetapan Syari'ah.....	79

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	84

DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
A. Terjemahan	I
B. Al-qur'an dan terjemah.....	II
C. Biodata Tokoh	VII
D. Data Pribadi	X

ABSTRAK

Konsep Negara Islam memang tidak ada bentuknya yang pasti, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak ada negara Islam. Didalam Islam, negara tidak lain hanyalah sebuah alat yang perlu bagi agama. al qur'an tidak menyebutkan satu konsep baku tentang sebuah negara dengan beberapa alasan; *pertama*, bahwasanya al qur'an pada prinsipnya adalah petunjuk etik bagi manusia, *kedua*, dalam hal ini institusi – institusi sosio politik dan organisasi manusia selalu berubah dari masa ke masa secara dinamis. Dalam perkembangannya, persoalan politik ketatanegaraan ini menjadi akar perdebatan dikalangan cendekiawan Muslim, politisi, dan dari kalangan akademisi sampai dengan saat ini. Berbagai teori muncul untuk memberikan satu *konklusi* tentang konsep negara dalam pandangan Islam, dan bagaimana Islam seharusnya menempatkan diri dalam sebuah sistem pemerintahan, yang tentu saja memiliki perbedaan teks dan konteks dengan sistem pemerintahan Islam pada masa Nabi.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menelusuri lebih dalam semua teori tentang Konsep Negara Islam yang dikemukakan oleh Amien Rais. Hasil dari penulisan ini diharapkan akan dapat dijadikan pertimbangan dalam memahami sebuah Konsep Negara Islam yang terkadang menimbulkan sebuah pemahaman yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya.

Penulisan skripsi ini bersifat analistik deskriptif, dengan mengambil semua teori yang di paparkan oleh para tokoh cendekiawan muslim terutama M.Amien Rais, yang memang banyak berpendapat tentang sebuah Konsep Negara Islam. Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini adalah dengan memahami secara seksama semua teori yang dikeluarkan oleh cendekiawan muslim khususnya Amien Rais, pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan normatif, sedangkan analisis datanya lebih menekankan pada proses penyimpulan induktif yaitu apa yang melatarbelakangi M. Amien Rais dalam menginterpretasikan teorinya tentang relasi Islam dan Negara.

Kesimpulannya Relasi Islam dan Negara menurut M. Amien Rais adalah bentuk sebuah Negara hanya bersifat formalistik, bukan menjadi persoalan bahwasanya negara itu disebut Sosialis, Pancasila, atau apa saja. Negara akan dipandang baik jika suatu Negara sudah menjalankan suatu etos Islam, kemudian menegakkan demokrasi yang adil, jujur, menciptakan masyarakat yang egalitarian, yang jauh dari eksploitasi manusia terhadap manusia terhadap golongan yang lainnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan akademis seputar relasi Islam dan negara sampai saat ini telah memicu ‘*konflik intelektual*’ Timur dan Barat yang dalam perkembangan selanjutnya menamakan dirinya sebagai golongan ‘*Nasionalis Islam*’ dan ‘*Nasionalis Sekuler*.¹ Islam sebenarnya telah meletakkan satu pondasi yang kokoh dalam membangun sebuah tata pemerintahan negara, yaitu pada waktu Muhammad SAW memimpin Madinah dengan disepakatinya Piagam Madinah² atau piagam tertulis antara orang-orang muslim Muhajirin bersama Anshor dan kaum Yahudi bersama sekutunya.³ Adapun mengenai pengakuan dirinya sebagai seorang pemimpin, sudah beliau terima ketika disepakatinya *Ba’iat al -‘Aqābah* pertama (621 M) dan *Ba’iat al-‘Aqābah* kedua (622 M).⁴

Dalam konteks Madinah sebagai sebuah negara, Muhammad SAW mempunyai peran ganda, sebagai kepala pemerintahan sebuah negara sekaligus sebagai *hakam* yang merupakan manifestasi beliau sebagai Rasul utusan Allah

¹ M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm.xi.

² Piagam Madinah oleh banyak pakar politik disebut sebagai Konstitusi Negara pertama dalam Islam. Dari 47 butir yang ada di dalamnya, tidak ada yang menyebutkan agama Negara. Kandungan tiap butirnya mayoritas hanya berisikan tentang aturan-aturan hubungan *intern* beragama dan hubungan dengan umat agama lain.

³ H. Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. ke-5, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm.10-15

⁴ Syuyuti J. Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-qur’an*, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.71

SWT. Syari'at Islam menjadi dasar tata pemerintahan negara pada waktu itu, yang selanjutnya sistem khilafah Islam dipegang oleh sekian khālifah, termasuk di dalamnya yang dikenal sebagai *al-Khulafā al-Rāshyidūn* (661-1924 M).⁵

Masa *khilafah* Islam ini berakhir bersamaan dengan runtuhnya sistem kekhālifahan yang dihapus oleh Majelis Nasional Turki (1924 M) yang pada waktu itu dipegang oleh Kemal at-Taturk.⁶ Sebelumnya dia juga telah menghapus sistem Kesultanan Turki (1922 M). Hal ini ternyata menimbulkan dampak yang begitu besar pada sistem pemerintahan negara yang secara struktural dan konstitusional berubah secara diametrikal. Puncaknya adalah pernyataan Konstitusi Negara bahwa Republik Turki adalah Negara Sekuler.⁷ Sekulerisasi Turki yang ditandai dengan jatuhnya *Imperium 'Abāssiyah* pada awal abad ke-20, ternyata memberikan wacana baru dalam khasanah pemikiran Islam Kontemporer. Setidaknya hal inilah yang melatarbelakangi perdebatan kontroversial seputar relasi Islam dan negara sampai saat ini.

Pada dasarnya Al-qur'an, seperti yang tersirat salah satu firman Allah dalam surat al Hujurāt, ayat: 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah khilafah, imāmah dan al-mulk, ketiganya atau dalam bentuk derivatifnya dijumpai dalam Al-qur'an. Perkataan khilafah pada umumnya dipandang sinonim dengan perkataan al-imāmah dalam makna institusi kepemimpinan politik. Secara etimologis, khilafah berasal dari akar kata yang berarti "*datang sesudah seseorang*." Secara teknis, khilafah menjadi kepala institusi pemilihan pengganti Nabi sebagai kepala komunitas Islam di Madinah. Dalam literatur klasik, gagasan suksesi mengandung empat unsur pokok, yaitu: Pendahulu (yang digantikan), Pengganti, sasaran suksesi; serta hak dan kewajiban yang timbul dari suksesi.

⁶ Faisal Ismail, *Islam Idealitas Ilahiyyah dan Realitas Insaniyyah*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana Group, 1999), hlm. 157.

⁷ *Ibid.*, hlm.123-124

Islam mengajarkan doktrin ikatan spiritual universal antar orang beriman. Akan tetapi dengan jumlah penduduk muslim yang sedemikian banyak dan tersebar di berbagai negara, mungkinkah diciptakan satu pemerintahan muslim yang ketat dengan seorang kepala negara? atau dengan kata lain konsep negara Islam terwujud dalam realitas empiris, kondisi sosial politik saat ini?

Dalam konteks ini, A.Syafi'iy Ma'arif mengatakan bahwa hal itu jelas tidak mungkin, karena idealitas dan realitas yang terjadi memiliki perbedaan teks dan konteks yang sangatlah kecil kemungkinannya untuk dapat dipertemukan.⁸ Beliau lebih setuju dengan solusi yang ditawarkan 'Ibn Taimiyyah,⁹ ketika *Imperrium 'Abbasiyah* jatuh pada pertengahan abad ke-13, dengan menciptakan Liga Bangsa-Bangsa Muslim yang longgar secara organisasi, tapi dengan landasan yang solid berupa persaudaraan imani universal yang tidak boleh dibinasakan oleh perbedaan politik kontemporer antar negara muslim.

Berbeda dengan pandangan Syafi'iy Ma'arif, Abul a'la al-Maududi (1903-1979 M) lebih mengidealkan kehidupan kenegaraan umat Islam semasa *al-Khūlafā' al-Rāsyhidun*. Prinsip Supremasi Syari'ah dalam hal ini menjadi landasan utama dan pokok bagi pelaksanaan tata pemerintahan sebuah negara. Artinya bahwa Negara Islam menjadi alternatif kunci pada pokok-pokok pemikiran beliau.¹⁰ Lebih jauh Al-Maududi bahkan mewajibkan kaum muslim

⁸ Syafi'iy Ma'arif, *Islam dan Politik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.186

⁹ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 173

¹⁰ Al-Maududi memberikan satu pembedaan yang substansial antara Negara Muslim dan Negara Islam. Suatu Negara muslim adalah semua Negara yang diperintah oleh kaum muslim.

untuk berjuang menegakkan Negara Islam. Konsepsi ini bertolak dari sebuah teori yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, totalitas dan komprehensif.¹¹ Islam tidak semata berbicara masalah-masalah akidah dan ritualitas *an-sich*, Islam juga tidak menyetujui penyekatan antara agama dan politik. Akan tetapi Islam menginginkan pelaksanaan politik selaras dengan tuntunan yang telah diberikan agama dan menggunakan negara sebagai pelayan Tuhan.¹² Dua kutub pemikiran Politik Islam klasik dan kontemporer inilah yang selanjutnya mewarnai perdebatan menarik seputar Relasi¹³ Islam dan Negara sampai dengan abad ke-20 ini.

Berbagai usaha *rekonstruksi* dan *revitalisasi* konsep pemikiran Negara Islam di Indonesia sendiri telah muncul dan menjadi polemik yang cukup menarik dikalangan cendekiawan muslim. Polemik antara Soekarno dan Moehammad Natsir setidaknya ikut mewarnai awal perdebatan kontroversial yang terjadi pada sekitar tahun 1940-an.¹⁴ Tipologi pemikiran Soekarno lebih cenderung

Sedangkan disisi lain, Negara Islam beliau meknakan sebagai sebuah Negara yang bertekad untuk melaksanakan urusan-urusan kenegaraannya sejalan dengan tuntutan wahyu serta mengakui kedaulatan Allah SWT, hukum-Nya dan yang mengabdikan segala sumber daya demi tujuan ini.

¹¹ Nurcholish Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern; Respons dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*, (Jakarta: PT. Media Cita, 2000), hlm. 206

¹² Dalam teorinya tentang Negara Islam, al-Maududi meletakkan tiga dasar utama sebuah Negara dalam Islam, yaitu: *pertama*, Islam adalah agama paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur segala segi kehidupan termasuk kehidupan politik. Oleh karenanya tidak perlu dan bahkan dilarang meniru sistem kehidupan Barat, cukup berkiblat pada pola politik semasa *al-Khulafa al-Rhasyidun*. *Yang kedua*, kekuasaan tertinggi yang dalam istilah politik disebut sebagai kedaulatan adalah ditangan Allah dimuka bumi. *Yang ketiga*, bahwasanya sistem politik Islam adalah sebuah sistem universal, tidak mengenal batas dan ikatan-ikatan geografis, bahasa dan kebangsaan.

¹³ Dalam studi ini, istilah ‘relasi’ diartikan sebagai hubungan, perhubungan, pertalian. Lihat: *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 830

¹⁴ A.Suhelmi Yahya, *Polemik Negara Islam Soekarno Versus Natsir*, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 72 dan H.Munawir Sadzali, *Islam dan...*, hlm. 191. Perdebatan kedua tokoh negarawan tersebut dimulai dengan munculnya artikel Soekarno yang menulis tentang “Apa sebab Turki

dipengaruhi oleh konteks Turki dengan sekularisasinya. Sedangkan buah ide pemikiran Moehammad Natsir tentang Relasi Islam dan Negara lebih cenderung mengambil ide-ide pokok yang dilontarkan oleh A.A. al-Maududi.

Munculnya dua rumusan pemikiran dari kedua tokoh negarawan tersebut ternyata belum mampu mencairkan konflik intelektual seputar relasi Islam dan Negara dikalangan cendekiawan muslim pada waktu itu. Terdapat beberapa substansi masalah yang belum terjawab atas polemik-polemik tersebut, yaitu; “Bagaimana bentuk dan isi negara dalam Islam? dan bagaimana seharusnya Islam menempatkan diri dalam tata pemerintahan sebuah institusi negara? Serta perlukah *revitalisasi* konsep Negara Islam dalam realitas empiris, peta perpolitikan Nasional di Indonesia sekarang ini?”

Nurcholish Madjid juga pernah menuliskan dalam teorinya bahwa secara normatif, baik dalam Al-qur'an maupun as-Sunnah, tidak terdapat perintah yang mutlak untuk mendirikan Negara Islam.¹⁵ Lebih jauh beliau juga menolak adanya partai politik yang dijadikan sebagai sebuah sarana perjuangan Islam. Berangkat dari analisis itu pula beliau menentang gagasan Negara Islam¹⁶ yang terus diperjuangkan oleh aktifis-aktifis Masyumi yang dipelopori oleh Mohammad Natsir, Agus Salim, dan rekan-rekannya.

memisahkan Agama dan Negara?” Dalam artikelnya Soekarno terkesan ingin memisahkan Agama dan Negara dalam dua kutub yang berlainan. Selanjutnya dalam artikel yang sama, sebagai sebuah respons apologetiknya, beliau secara tegas menolak ide dan konsep pemikiran yang dituangkan Soekarno. Menurutnya, bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif termasuk pola politik Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan darinya.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 116. Beliau juga berusaha menjinakkan atau mengobjektifikasikan Islam Politik yang merupakan pembacaan atas antropologi politik yang beliau selaraskan dengan setting sosio-kultural masyarakat Indonesia.

¹⁶ Firdaus Syam, *Amien Rais: Politisi yang rakyat dan Intelektual yang Shaleh*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm.170.

Pada skala politik Nasional, Muhammad Natsir melihat keterkaitannya agama dan Negara. Hal ini wajar karena ide M. Natsir selalu didasarkan pada dalil Al-qur'an, terutama pada QS. Al-Hujurat:13 yang meyakini eksistensi bangsa-bangsa, tetapi menolak nasionalisme sempit yang mengarah pada "*ashabiyah*" soal kebangsaan merupakan sesuatu yang fitrah dan alami. Namun ide universalis Islam harus menjadi nafas pada paham kebangsaan. Mengenai "tanah air" dalam artikelnya dikemukakan: "Dan janganlah ia lupa, bahwa tanah airnya sendiri itu sebagian dari tanah Agamanya dan wajib ia sungguh-sungguh untuk menjadikan kemajuan tanah airnya sendiri itu. Sebagai wasiah (perantara) untuk tanah dunia Islam".¹⁷

Sedangkan Munawir Sazali dan nurchilis Madjid menolak keterkaitannya Agama dan Negara itu sendiri. Ajaran islam seharusnya mengatur politik, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, elit dan penguasa politik mengeksploitasi orang dan konsep Islam untuk kepentingan mereka. Hasilnya bukanlah politik yang terbimbing oleh moral agama, tetapi agama dimanipulasi untuk memobilisasi masa agar menerimanya untuk melayani tujuan sesaat partai politik.

Berangkat dari sebuah asumsi bahwa Islam adalah agama yang lengkap, sempurna dan komprehensif, sehingga tidak mungkin ditancapkan pada realitas sosial tanpa pedang penolong, M. Amien Rais menganggap bahwa negaralah yang menjadi pedang penolong.¹⁸ Dalam konsepsi ini beliau melihat Islam

¹⁷ Relevan dengan H. A. R. Gibb dalam H. A. R. Gibb, *Modern Trends in Islam* (The University of Chicago, 1947), hlm. 52-53.

¹⁸ A. Syafi'iy Ma'arif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 183. Konsep ini juga sesuai dengan hampir semua penulis modern seperti: M. Yusuf Musa, J. Schacht, C.A. Nlimo dan H.A.R. Gibb.

sebagai “*al Dīn wa al Daūlah*” (Agama dan Negara).¹⁹ Di sisi lain, beliau menolak konsep negara Islam seperti halnya Nurcholish Madjid.²⁰ Namun demikian beliau menolak ide *sekularisasi* atau *sekulerisme* seperti yang dipropagandakan oleh cendekiawan muslim Nurcholish Madjid tersebut, karena keterkaitan secara *inhern* antara Islam dengan persoalan-persoalan sosial politik.²¹

Pada dasarnya M. Amien Rais mempunyai latar belakang pemahaman keislaman dari akar budaya Islam yang cukup kuat. Namun ketika dilihat dari peringkat mempersepsikan nilai-nilai fundamental kedalam perjuangan politiknya. Jelas M. Amien Rais memiliki perbedaan dengan tokoh Islam modern lainnya, hal ini tercermin dari sikap politik yang dianutnya. Hal ini terjadi karena adanya korelasi antar nilai-nilai dasar dan pengalaman dengan situasi budaya politik yang berbeda.

Hal inilah yang memberikan daya tarik bagi penyusun untuk menggali lebih jauh titik-titik krusial yang membedakan tipologi dan arah pemikiran seputar

¹⁹ Teori ini bukan berarti bahwa bentuk negara yang ada dalam konsep Islam adalah negara Islam yang meletakkan landasan konstruksi Syari’ah sebagai dasar negara. Beliau memberikan sebuah pemahaman bahwa sebagai agama yang lengkap dan *komprehensif* Islam sebenarnya juga mempunyai konsep-konsep, yang diakuinya sebagai sebuah landasan elementer sebuah Negara. Disini Islam tidak mengenal dikotomisasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Termasuk didalamnya, kehidupan berpolitik bagi umatnya. Itu semua merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

²⁰ Firdaus Syam, *Amien Rais; Politisi yang Rakyat dan Intelektual Yang Shaleh*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 181. Konsep Negara Islam menurut beliau tidak ada dalam Islam, dalam Al-qur’an maupun Sunnah rasul seperti halnya yang dituangkan oleh Nurcholish Madjid. Yang terpenting menurut beliau adalah suatu Negara menjalankan etos Islam, kemudian menegakkan keadilan sosial dan menciptakan masyarakat yang egalitarian yang jauh dari eksploitasi dari pihak manapun.

²¹ Amien Rais, *Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan, Cet.1*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm.77. Beliau mendeskripsikan bahwasanya meskipun sekularisasi dicoba untuk dibedakan dengan sekulerisme dengan alasan yang terakhir ini adalah ideologi sedang yang pertama merupakan proses sosial yang sifatnya *Open ended*, akan tetapi pada dasarnya sekularisasi juga merupakan ideologi, yaitu ideologi *sekulerisasione* yang ingin menjauhkan urusan agama dengan urusan politik. Padahal menurut beliau persoalan agama dan politik justru saling bersatu.

relasi Islam dan Negara dari tokoh cendekiawan muslim tersebut, serta mencari bentuk dan konsep negara dalam Islam dalam pandangan M. Amien Rais.

B. Pokok Masalah

Dari sekian banyak teori tentang Relasi Islam dan Negara, baik dari kalangan *Nasionalis Islam* maupun *Nasionalis Sekuler*,²² serta *reinterpretasi* M. Amien Rais, maka dapat penyusun ambil beberapa pokok masalah yang dijadikan bahan kajian dalam skripsi ini. Di antara substansi masalah pokok itu adalah :

1. Bagaimanakah bentuk negara dalam pandangan M. Amin Rais yang ideal?
2. Apa yang melatarbelakangi M. Amin Rais dalam menginterpretasikan teorinya tentang relasi Islam dan Negara?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Berangkat dari pokok masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

3. Mendeskripsikan serta memberikan analisis terhadap pandangan Amin Rais dalam merumuskan teorinya tentang konsep negara di dalam agama Islam.
4. Menelusuri pandangan Amin Rais tentang konsepsi Islam dan Negara.

²² Pengelompokan ini mulai muncul di Indonesia, setidaknya ketika terjadi perdebatan menarik seputar Relasi Islam dan negara dari kalangan *Islamis* dan *sekuleris* pada waktu penetapan dasar Negara RI oleh Badan Konstituante. Golongan Islamis diwakili oleh Agus Salim dan M. Natsir, sedangkan golongan *sekuleris* terwakili oleh tokoh negarawan Ir. Soekarno.

5. Menemukan formulasi yang tepat tentang Relasi Islam dan Negara sebagai bahan kajian dalam bidang keilmuan saat ini.

Adapun skripsi ini diharapkan akan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam khasanah keilmuan Islam khususnya dalam bidang politik ketatanegaraan dengan memberikan analisis deskriptif yang lebih jelas dan konkrit terhadap pandangan kedua tokoh cendekiawan muslim tersebut.

D. Telaah Pustaka

Perdebatan intelektual mengenai Relasi Islam dan Negara serta kontroversi pemikiran Negara Islam sebenarnya telah berlangsung lama,²³ serta melahirkan berbagai teori dengan paradigma yang berbeda. Banyak karya sastra berupa buku, karya-karya ilmiah dan artikel-artikel di majalah serta tulisan di media yang mengangkat tema tersebut. M. Amien Rais sebagai tokoh sentral dalam skripsi ini, juga memberikan analisisnya sebagai sebuah respon akademik dalam

²³ Pada fase pertama awal kemunculan ide Negara Islam, muncul beberapa tokoh cendekiawan muslim ternama seperti: Syekh Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Shekh M. Rhasyid Ridha, dan tokoh teravokal Maulana A.A. Al-Maududi, yang berpendirian bahwa Islam sebenarnya bukanlah semata-mata hanyalah agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut urusan manusiadan Tuhan-Nya *an-sich*. Namun sebaliknya bahwa Islam sebenarnya adalah agama yang sempurna dan komprehensif yang didalamnya termasuk juga pengaturan kehidupan bernegara. Kemudian muncul tokoh terkemuka Ali Abd al-Raziq dan Dr. Thaha Husein yang berpendapat bahwa Islam sebenarnya seperti dalam pengertian Barat, hanya mengatur kehidupan keagamaan tanpa ada aturan dalam urusan ketatanegaraan. Fase selanjutnya, yang lebih merupakan sebuah respons apologetik atas pendapat dari dua golongan tersebut, muncul Dr. M. Thaha Husein Haikal yang menolak bahwasanya Islam adalah agama yang serba lengkap, namun beliau juga menolak anggapan yang mengatakan bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya *an-sich*. Aliran ini berpendapat bahwa Islam sebenarnya tidak mengatur sistem ketatanegaraan, akan tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Di Indonesia sendiri, polemik ini muncul sudah sebelum kemerdekaan RI, yaitu pada waktu penetapan ideologi bangsa oleh BPUPKI. Polemik antara Soekarno, Dr. Radjiman, M. Hatta, M. Yamin serta tokoh-tokoh lain yang menyertai kaum Nasionalis dengan M. Natsir, Ki Bagus Hadi Kusuma, Kahar Muzakkar dan tokoh-tokoh negarawan dari kelompok pembela dasar Islam lainnya. Jauh sebelum itu antara pimpinan Sarekat Islam (SI) dengan Dr. Sukiman Wirjo Sandjojo pada tahun 1920-an juga telah berbicara tentang suatu kekuasaan pemerintahan Islam.

mengeliminir polemik Islam dan Negara yang masih menjadi kontroversi dikalangan kaum intelektual muslim saat ini.

M. Amien Rais, dalam hal ini menolak adanya konsep Negara Islam.²⁴ Akan tetapi disisi lain beliau tetap mengakui bahwa Islam adalah *Dīn* dan *Daūlah* (Agama dan Negara)²⁵ yang merupakan *implementasi* dari sebuah agama yang lengkap dan *komprehensif*. Dengan landasann fikir seperti ini, beliau secara tegas menolak adanya faham sekulerisme²⁶ yang berusaha mendikotomisasi kehidupan duniawi dan ukhrowi, immanen dan transendental, profan dan sakral. Yang kesemuanya itu menurut beliau hanya akan menghasilkan manusia modern yang memiliki kepribadian pecah atau '*Split Personality*'.²⁷

Tijani Abd. Qadir Hamid dalam salah satu karyanya²⁸ menjelaskan bahwa secara *aksiomatik*, negara merupakan satu kekuasaan sentral pemaksaan dan

²⁴ Amien Rais, Putra Nusantara: *Mohammad Amien Rais*, (Singapore: Stanford Press, 1999), hlm.11. Mengenai hal ini beliau secara tegas memberikan alasan bahwa dalam Al-qur'an maupun Sunnah tidak ada yang mengatakan tentang bentuk Negara (Islam) atau mengenai kewajiban seorang muslim, baik secara moral maupun politis untuk mendirikan Negara Islam. Hanya saja didalam Al-qur'an Allah mengajarkan bahwa sebagai umat yang beriman, kita harus menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan yang sifatnya *multidimensional*, yang meliputi keadilan hukum, sosial, ekonomi, politik dan keadilan dalam pendidikan.

²⁵ Syafi'iy Ma'arif, *Islam dan Politik:Teori Belah Bambu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm.183. Konsep ini juga sesuai dengan pendapat hampir semua penulis modern, seperti: M.Yusuf Musa, J.Schact, CA. Nlimo, dan HAR. Ghibb. Artinya bahwa pemisahan antara agama dan negara tidak dapat diterima. Syari'ah dalam Islam bersifat *inhern*: al-qur'an dan Sunnah memberikan Syari'ah, dan negara memperkuatnya.

²⁶ Sekulerisme menurut beliau merupakan suatu faham atau ideologi hidup yang mengajarkan bahwa agama merupakan masalah pribadi yang tidak ada kaitannya dengan urusan kemasyarakatan, seperti masalah politik, ekonomi, kebudayaan maupun Iptek. Beliau melihat sekulerisme dan sekulerisasi dengan makna yang berbeda. Sekulerisasi merupakan suatu proses yang secara lambat laun akan menuju juga pada sekulerisme yang merupakan sebuah faham yang sama sekali tertolak dalam ajaran Islam, dalam Al-qur'an maupun Sunnah rasul.

²⁷ M.Amien Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm.76

²⁸ Tijani Abd Qadir Hamid, *Pemikiran Politik Islam Dalam Al-qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 262

‘Negara Allah’ tidak ada wujudnya dalam Al-qur’an.²⁹ Begitu juga Thoha Hamim,³⁰ ketika melihat fakta politik kaum Islam Militan³¹ yang dengan keras berusaha *merevitalisasi* asas dasar Islam dalam kehidupan bernegara. Beliau mengatakan bahwa dalam konteks sistem perpolitikan seperti sekarang ini, hal itu sangatlah sulit untuk dicarikan landasan argumentasinya.³²

Dalam melihat masalah ini, Kamaruzzaman menyatakan bahwa bentuk hubungan Agama (Islam) dan Negara adalah tidak dapat dipisahkan.³³ Beliau juga menolak faham sekulerisme Nurcholish Madjid yang mengatakan bahwa : “Negara Islam itu *inklusif* tidak *eksklusif*.”³⁴

Polemik agama dan negara, meskipun telah melahirkan bermacam teori dengan paradigma yang beragam, akan tetapi belum juga memperoleh satu titik temu, yang selanjutnya menjadi teori baku tentang bentuk sebuah negara dalam pandangan Islam. Hal inilah yang mendorong penyusun untuk melakukan

²⁹ Teori ini mirip dengan teori kekuasaan yang sering dikemukakan oleh Hobbes, yang menyatakan bahwa Negara merupakan kekuasaan sentral.

³⁰ Thaha Hamim, *Islam dan NU: Dibawah Tekanan Problematika Kontemporer Dialektika Kehidupan Politik, Agama, Pendidikan dan Sosial Masyarakat Muslim*, (Surabaya: Diantama Press, 2004), hlm.4

³¹ Kaum Islam Militan, beliau mengambil satu contoh Laskar Jihad *Ahlussunnah Wal Jama’ah*, yang lebih memiliki *preferensi* kepada institusi khilafah daripada institusi kepresidenan yang dihasilkan oleh sistem ketatanegaraan modern.

³² Sistem ketatanegaraan Islam (khilafah) dalam pengertian beliau sebenarnya tidak termasuk kedalam doktrin keagamaan, tapi kategorinya masuk kedalam institusi sosial. Alasan lebih jauh lagi beliau menganggap bahwa konsep khilafah selalu berubah secara dinamis. Khilafah yang terbentuk dengan nuansa yang demokratis pada masa *al-Khulafa al-Rāshidun* (632-661 M) berubah menjadi *autocratic monarchi* dizaman dinasti-dinasti Islam pasca al-Khulafa al-Rāshidun (661-1924 M). Alasan lain karena institusi khilafah selalu berevolusi, sesuai dengan kodratnya sebagai institusi sosial.

³³ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perpektif Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang: IndonesiaTERA, 2001), hlm.129

³⁴ *Ibid.*, hlm.121, dan Kamaruzzaman, *Mengapa demokrasi Agama diIndonesia : Perspektif Sitem Politik Islam*, (Jakarta; Profetika, 2000), hlm.37-55

penelitian terhadap pemikiran M. Amien Rais tentang relasi Islam dan negara, karena sejauh pengetahuan penyusun, belum ada skripsi atau karya sastra lainnya yang mengangkat tema pokok dalam skripsi ini sebagai satu kajian keilmuan.

E. Kerangka Teoretik

Perdebatan menarik seputar Relasi Islam dan Negara ternyata masih menjadi pembahasan menarik dalam kalangan cendekiawan muslim Timur dan Barat. Jalinan hubungan yang teramat rumit, memunculkan berbagai corak pemikiran baik yang mendukung maupun yang menolak konsep Negara Islam dengan berbagai alasan dan sudut pandang yang berbeda-beda.

Perbedaan itu muncul bukan hanya disebabkan oleh faktor sosio-budaya-historis *an-sich*, namun terdapat juga aspek *teologis-doktrinal* dalam hal ini. Islam sebagaimana kita tahu telah mempunyai konsep “*khalīfah, daulah dan hukumah*” tetapi Al-qur’an dan Sunnah belum memberikan penjelasan tentang konsep itu secara rinci.³⁵ Sehingga dari sinilah akar perdebatan kontroversial seputar relasi Islam dan negara itu muncul diberbagai kalangan dan telah menjadi polemik yang berkepanjangan sampai dengan saat ini.

Munawir Sadzali menulis bahwa Islam adalah agama yng didalamnya tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi

³⁵ Didalam Al-qur’an maupun Hadist tidak disebutkan bagaimana sebenarnya bentuk dan perangkat instrumental sebuah Negara ataupun petunjuk tentang konsep tersebut. Alqur’an hanya memebrikan petunjuk yang sifatnya umum, agar umat Islam mencari penyelesain dalam masalah-masalah bersama melalui musyawarah, itupun tidak menyebutkan pola yang baku tentang bagaimana musyawarah itu seharusnya dilaksanakan.

kehidupan bernegara.³⁶ Beliau menjelaskan bahwa konsep yang menyebutkan bahwa Islam adalah agama *paripurna* yang lengkap, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk sistem pemerintahan dengan merujuk kepada pola politik semasa *al-Khulafā' al-Rāsyidūn* adalah sebuah observasi yang salah.³⁷ Alasan beliau bahwa hal itu akan sarat dengan kontradiksi dan sukar dilaksanakan dalam kondisi masyarakat sebuah negara yang majemuk.

Sejarah menunjukkan bahwa latar belakang sosio-kultural akan memiliki pengaruh yang sangat dominan terhadap pola pembentukan *jurisprudence* hukum. Begitu juga kerangka berfikir dan menfanalisa problematika kontemporer yang berkembang. Artinya bahwa teks dan konteks masalah yang terjadi sekarang, tidak selamanya dapat *dianalogkan* kepada konteks yang telah lalu. Habieb Rizieq Shihab³⁸, dengan mengutip perkataan Al-Ghazali, mengatakan:

“... Bahwa agama adalah pondasi, pemerintah sebagai penjaganya. Apa-apa yang tidak ada pondasinya pasti akan rapuh. Dan apa-apa yang tidk dijaga pasti akan hilang.³⁹”

Dari sini nampak jelas pemikiran beliau bahwa menurutnya antara agama dan negara (kekuasaan) tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini beliau tidak mencoba untuk bersikap menjadi salah satu dari kelompok yang saat ini muncul, yaitu kelompok *formalistik* maupun *substansialistik*. Dan beliau mencoba

³⁶ Munawir Sadzali, *Islam dan Tatanegara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 235-236

³⁷ *Ibid.*, hlm.234

³⁸ Beliau adalah ketua Front Pembela Islam (FPI), salah satu organ Islam yang juga getol bersuara nyaring menuntut ditegakkannya Syari'at Islam di Indonesia.

³⁹ Habieb Rizieq Shihab, *Jika Syari'at Islam, maka jadi Negara Islam*. Dalam jurnal Tashwirul Afkar. *Deformulasi syari'at Islam...*, (Jakarta: Lakpesdam NU-TAF, 2002), Edisi No.12, hlm.99

mengaitkan bagaimana substansi dari sebuah agama dapat dijalankan dengan jalan menjaganya secara formal. Analisa ini berangkat dari sebuah asumsi bahwasanya Islam itu terdiri dari unsur aqidah, syari'at dan akhlaq, yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Epistimologi rasional selalu menuntut untuk berfikir secara holistik, keseluruhan dan tidak parsial. Sehingga praktis epistimologi rasional ini menyelamatkan umat Islam dari sekulerisasi yang berimplikasi pada pemisahan agama dan negara secara total.⁴⁰

F. Metode Penelitian

Dalam upaya memperoleh analisa yang jelas, rinci dan sistematis atas permasalahan ini, penyusun menggunakan beberapa metodologi, yaitu:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang digunakan dengan cara mempelajari dan menelaah bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data primer dan sekunder.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *deskriptif Analitik*. Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan suatu masalah yang masih umum atau luas menjadi khusus atau terperinci baik dalam bentuk

⁴⁰ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam, Cet. 2*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm.27

teori maupun metodologi, untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan. Analisis adalah menguraikan suatu persoalan secara cermat dan terarah.⁴¹

c. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *Normatif*. Yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam menganalisa sebuah objek kajian dengan menekankan pada kebenaran dan ketepatan suatu argumentasi yang dijadikan pijakan dengan kaidah yang ada diletakkan pada *spektrum* yang lebih luas, yaitu latar belakang *sosio-kultural* masyarakatnya.

d. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan data-data sebagai referensi, yang penyusun mengelompokkan menjadi tiga kategori data, yang meliputi: sumber data primer yaitu: *Al-qur'an dan Hadist*. Sumber data sekunder yang penyusun ambil dari buku-buku, artikel maupun karya tulis. Serta sumber data tersier yang penyusun ambil dari ensiklopedia yang masih memiliki korelasi baik langsung maupun tidak langsung dengan tema pokok dalam skripsi ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara yang digunakan dalam menganalisa, mempelajari serta mengolah data-data tertentu, sehingga dapat diambil sebuah *konklus* yang konkrit mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

⁴¹ M.Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63

Analisis data yang penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah analisis data *kualitatif* dengan metode *Deskriptif*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami pokok-pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini, maka secara sistematis penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang Relasi Islam dan Negara yang terbagi menjadi beberapa sub-bab yaitu Konsep negara dalam pandangan Islam, konsep negara dalam pandangan Barat serta kontroversi konsep pemikiran Negara Islam di Indonesia.

Bab ketiga merupakan penelitian terhadap kehidupan M. Amien Rais, yang berupa latar belakang sosial, pendidikan serta karya – karya beliau, dan dibahas pula secara lebih mendalam pemikiran – pemikiran beliau tentang politik dalam pandangan Islam, pandangan sekulerisme agama dan bagaimana seharusnya Islam menempatkan diri didalam pluralitas kehidupan politik Nasional di Indonesia saat ini.

Bab keempat merupakan pandangan pemikiran M. Amien Rais tentang relasi Islam dan negara, yang meliputi pandangan M. Amin Rais terhadap Islam dan

Negara, latar belakang pemikiran M. Amien Rais, pandangan Amien Rais
Perspektif Fiqh Siyasah, Konsistensi Relasi Islam, Negara dan Penetapan Syari'ah

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan dari semua analisis yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya dan saran-saran yang diperlukan sebagai acuan perbaikan bagi pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan tema pokok skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pandangan Amien Rais, bentuk sebuah negara hanyalah bersifat formalistik, bukan menjadi persoalan bahwasanya negara itu disebut Sosialis, Pancasila atau apa saja. Negara akan dipandang baik jika suatu negara sudah menjalankan suatu *etos* Islam, kemudian menegakkan keadilan, sosial, menciptakan masyarakat yang *egalitarian*, yang jauh dari eksploitasi manusia terhadap manusia maupun golongan lainnya. Didalam agama Islam tidak disebutkan bentuk baku sebuah negara, baik dalam Al-qur'an maupun Sunah Rasul, jadi tidak ada kewajiban bagi seorang atau sekelompok Muslim untuk mendirikan Negara Islam dan menjadikan Islam sebagai ideologi negara.

Lebih jauhnya setelah menolak Negara Islam, Amien Rais ternyata lebih memilih Negara demokrasi, yang merupakan sistem politik yang telah mengalami ujian sejarah peradaban manusia selama berabad-abad dan kini telah diyakini secara universal sebagai sistem terbaik bagi kemanusiaan. Namun Amien tetap mendasarkan pemikiran itu pada Syari'ah, bentuk negara demokrasi yang beliau inginkan yaitu: pertama, Negara harus dibangun atas dasar keadilan dalam arti seluas-luasnya. Tidak hanya keadilan hokum yang menjanin persamaan hak setiap orang dihadapan hokum, belum cukup bila tidak dibarengi dengan keadilan social ekonomi, karena masih dapat terjadi ketimpangan-ketimpangan tajam dalam masyarakat. Kedua, Negara harus dibangun dengan mekanisme musyawarah.

Ketiga, Negara harus menegakkan prinsip persamaan, yang didalamnya terkandung prinsip persaudaraan.

M. Amien Rais dalam menginterpretasikan teorinya guna mewujudkan idealisme Islam, tentunya memerlukan seperangkat penyelenggara sebuah negara, yang tentunya *mampu* dan *compatible* dalam bidang penyelenggaraan tata pemerintahan itu sendiri.

M. Amien Rais melihat kemajemukan bangsa Indonesia dari berbagai latar belakang ras, suku, etnis, dan tradisi merupakan suatu kenyataan hidup yang tidak bisa dielakkan. Oleh sebab itu Negara Indonesia memang dilandaskan pada keyakinan bahwa Indonesia hanya bisa bertahan bila tetap berpegang teguh pada prinsip pluralisme dan toleransi, Bhineka Tunggal Ika.

Ketika mencoba mencermati pemikiran Amien Rais, bahwasanya demokrasi memang lebih tepat diterapkan di Indonesia dengan catatan masih memakai nilai-nilai Islami. Karena keadaan sosial dan budaya yang ada di Indonesia berbeda dari satu tempat ketempat lain. Tetapi hal tersebut masih butuh pengertian dari setiap perorangan perihal pengertian demokrasi itu sendiri, karena jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan arti demokrasi yang sesungguhnya dan melepaskan nilai-nilai agama, maka hal tersebut malah akan melenceng dari tujuan demokrasi tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama disemua lini dalam menjalankan pemerintahan, karena hal tersebut yang menjadikan terciptanya suatu pemerintahan yang baik.

Tidak mudah dalam menyatukan keberagaman perbedaan yang ada dalam masyarakat, apalagi hal tersebut menyangkut kehidupan beragama maupun sosial

budaya. Dibutuhkan formula khusus dalam menyatukan hal tersebut, dan saling pengertian atau tenggang rasa satu sama lainnya.

B. Saran – Saran

Setelah mempelajari dan melakukan analisa terhadap beberapa teori ketatanegaraan, khususnya M. Amien Rais perlu kiranya penulis memberikan beberapa saran :

1. Dalam menciptakan dinamisasi dan kondusifitas iklim perpolitikan Nasional saat ini, perlu kiranya ada kesefahaman diantara para tokoh dan cendekiawan dengan menawarkan konsep baku dan terperinci tentang bentuk negara didalam Islam.
2. Realitas empiris dan kondisi sosio kultural merupakan satu faktor yang mempengaruhi sebuah analisa tokoh yang pada perkembangan selanjutnya menjadi satu teori baru didalam khasanah keilmuan Islam.
3. Epistimologi rasional selalu menuntut untuk berfikir secara holistik, keseluruhan dan tidak parsial. Landasan inilah yang seharusnya menjadi pijakan para cendekiawan dalam menanggapi dan merespon segala dinamika sosial yang berkembang secara dinamis terkait masalah politik kenegaraan pada khususnya.
4. Islam adalah agama Universal, didalamnya termuat kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan-Nya. Artinya, pemisahan Agama dan Negara, berfikir parsial terhadap satu

persoalan keduniawian, hanya akan menciptakan manusia modern yang berjiwa pecah (*split personality*).

5. Campur tangan agama dalam urusan kenegaraan, pada dasarnya bukan menjadi penyebab adanya stagnasi pembangunan. Hal ini akan kembali pada individu-individu pelaksananya. Fakta sejarah membuktikan bahwa Islam pernah mengalami zaman keemasannya ditangan kekhelifahan Islam.
6. Penulis menyadari bahwa penelitian dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga pada penelitian-penelitian selanjutnya penulis berharap dapat memberikan koreksi dan deskripsi dengan analisa yang lebih baik sebagai satu kajian keilmuan Islam, kaitannya tentang Relasi Islam dan Negara.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuk, kemampuan dan segala nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam skripsi ini, dengan segala kekurangan dan kelebihanannya. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Qur'an

Departemen RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Departemen Agama, 1996

B. Kelompok Fiqih

Syafe'iy, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1995

Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, Pustaka Antara-The Ford Foundation, 1999

Geertz, Clifford, *Politik Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1992

Hamid, Abd. Qadir, Tijani, *Pemikiran Politik Islam Dalam Al-qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Hidayat, Kamaruddin, *Kata Pengantar dalam: Nurcholish Madjid, Islam agama Peradaban, Membangun Makna dn Relevansi Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1985

Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, Bandung: Mizan, 1996

Ismail, Faisal, *Islam Idealitas Ilahiyyah dan Realitas Insaniyyah*, Yogyakarta: Tiara Wacana Group, 1999

Kamaruzzaman, *Mengapa demokrasi Agama diIndonesia : Perspektif Sistem Politik Islam*, Profetika, 2000

Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara : Perpektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: IndonesiaTERA, 2001

Karim, Rusli, M, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999

Ma'arif, Syafe'iy, *Islam dan Politik; Teori Belah Bambu*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Madjid, Nurcholish, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern : Respons dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*, Jakarta: PT. Media Cita, 2000

_____, *Dialog Keterbukaan: Artikulasi nilai-nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 1998

_____, *Khasanah Intelektual Muslim*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

Natsir, Moehammad, *Islam Sebagai Dasar Negara*, Bandung: Pimpinan Fraksi Masyumi dalam Konstituante, 1957

Pikri, A, *50 Alasan Mengapa Memilih Amien Rais*, Jakarta: Permata Nusantara, 2004

Pulungan, Suyyuti J, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari pandangan Al-qur'an*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996

Ridwan, Deden, M, *Gagasan Nurcholish Madjid: Neo Modernisme Islam Dalam Wacana Tempo dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Belukar Budaya, 2002

Sadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1996

Santoso, Edy, Agus, *Tidak ada Negara Islam; Surat-surat Politik Nurcholish Madjid-Mohammad Roem*, Jakarta: Jambatan, 1997

Shihab, Rizieq, Habib, *Jika Syari'at Islam , maka jadi Negara Islam. Dalam jurnal Tashwirul Afkar. Deformulasi syari'at Islam*, Jakarta: Lakpesdam NU-TAF, 2002

Yahya, Suhelmi, *Polemik Negara Islam Soekarno versus Natsir*, Jakarta: Teraju, 2002

C. Kelompok Buku Lain

Jamaluddin, Deddy, *Zaman Baru Islam Indonesia*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998

Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997

Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002

Nadroh, Siti, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999

Rais, Amien, *Putra Nusantara: Mohammad Amien Rais*, Singapore: Stanford Press, 1999

_____, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan, 1998

_____, *Cakrawala Islam*, Bandung: Mizan, 1987

_____, *Menyembuhkan Bangsa yang Sakit*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999

Sumargono, Ahmad, *Saya Seorang Fundamentalis*, Bogor: Global Citra Press (GCP), 2000

Syam, Firdaus, *Amien Rais Politisi Yang Merakyat Dan Intelektual Yang Shaleh*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003

D. Kelompok Artikel dan Majalah

Panji Masyarakat, No. 843 Tahun XXXVI / 15 – 30 November 1995

Suara Gemilang, No. 34 Tahun 7 – Oktober 2003

Arrisalah, Edisi XXXX / Th. XVI / 2003

Lampiran 1

TERJEMAHAN

Hlm.	Surat (ayat)	TERJEMAH
		BAB I
2	al-Hujurāt (10)	Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
		BAB III
51	al-Ġhāsyiyah (21-22)	Maka berikanlah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan (21) Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka (22)
52	al-Bāqarah (256)	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut (;syaitan dan apa saja yang disembah selain Allah SWT), dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Lampiran 2

Al-Qur'an dan artinya

Al-Baqoroh: 256

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطغوت ويؤمن بالله
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم

256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[1] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

[1] Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t.

Al-Hujuraat: 10,

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

10. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Al-Ghaasyiyah: 21-22

فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر

21. Maka berilah peringatan, Karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.

22. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka,

Al-'imron: 104, 110, 114

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
وأولئك هم المفلحون

104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[2]; merekalah orang-orang yang beruntung.

[2] Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
وتؤمنون بالله ولو ءامن أهل الكتب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون
وأكثرهم الفسقون

110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
ويسرعون في الخير وأولئك من الصالحين

114. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.

Al-A'raaf: 157

الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي تجدونه مكتوبا عندهم في
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر وتحل لهم الطيبات
وتحرم عليهم الخبيث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم
فالذين ءامنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم
المفلحون

157. (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka[3]. Maka orang-orang yang beriman

kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

[3] Maksudnya: dalam syari'at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya: mensyari'atkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa membolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis.

At-Taubah: 67, 71, 112

المنفقون والمنفقت بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن
المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنفقين هم
الفسقون

67. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya[4]. mereka Telah lupa kepada Allah, Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.

[4] Maksudnya: berlaku kikir

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك
سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم

71. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

التائبون العابدون الحامدون السائحون الركعون
السجدون الأمارون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون
لحدود الله وشر المؤمنين

112. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat[5], yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.

[5] Maksudnya: melawat untuk mencari ilmu pengetahuan atau berjihad. ada pula yang menafsirkan dengan orang yang berpuasa.

Al-Hajj: 41

الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلوة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف
ونهاوا عن المنكر والله عنقبة الأمور

41. (yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Luqman: 17

يبنى أقم الصلوة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن
ذلك من عزم الأمور

17. Hai anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

Al-Maaidah: 8

يأيها الذين ءامنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن
قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما
تعملون

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

An-Nisaa': 58

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا

بالعدل إن الله نعماء يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Lampiran 3

BIOGRAFI M. AMIEN RAIS

M. AMIEN RAIS

Tempat Tgl. Lahir : Kampung Kepatihan Kulon, RT.02/RW.05, Kecamatan
Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 26 April
1944 M.

Pendidikan :

1. SD Muhammadiyah Solo (1956)
2. SMP Muhammadiyah Solo (1959)
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah di Solo (1962)
4. Jurusan Tarbiyah di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1967)
5. Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1968
6. Notre Dame University (1974)
7. University of Chicago (1984)
8. Pelajar khusus (*Dirāssah Khāssah*) di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir (tahun 1981)
9. Post Doctoral di George Washington University dan UCLA, Amerika Serikat (1988-1989)

Organisasi :

1. Ketua 'Hisbul Waṭḥān' (1957)
2. Anggota Komite Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) pada tahun 1963-1965
3. Sekretaris LDMI HMI, Yogyakarta (1965)

Karier :

1. Wakil Ketua Muhammadiyah (1990)
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1995-2000

3. Pendiri dan ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tahun 1998
4. Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1974)
5. Ketua MPR RI (1998-2004)

Karya – karya :

Penelitian :

1. Prospek Perdamaian Timur Tengah 1980 – an (Litbang Deplu RI)
2. Perubahan Politik Eropa Timur (Litbang Deplu)
3. Kepentingan Nasional Indonesia dan Perkembangan Timur Tengah 1990–an (Litbang Deplu)
4. Zionisme: Arti dan Fungsi (Fisipol, UGM)

Buku – buku :

1. Orientalisme dan Humanisme Sekuler (Yogyakarta: Salahuddin Press, 1983)
2. Politik dan Pemerintahan di Timur Tengah (PAU-UGM)
3. Tugas Cendekiawan Muslim [Terjemahan Ali Syariati] (Yogyakarta: Salahuddin Press, 1985)
4. Cakrawala Islam, Antara Cita dan Fakta (Bandung: Mizan, 1987)
5. Politik Internasional Dewasa ini (Surabaya: Usaha Nasional, 1989)
6. Timur Tengah dan Krisis Teluk (Surabaya: Amarpress, 1990)
7. Keajaiban Kekuasaan (Yogyakarta: Bentang Budaya-PPSK, 1994)
8. Moralitas Politik Muhammadiyah (Yogyakarta: Penerbit Pena, 1995)
9. Tangan Kecil (Jakarta: UM Jakarta Press, 1995)
10. Demi Kepentingan Bangsa (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
11. Visi dan Misi Muhammadiyah (Yogyakarta: Pustaka SM, 1997)
12. Refleksi Amien Rais, dari persoalan semut sampai gajah (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
13. Suksesi dan Keajaiban Kekuasaan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
14. Mengatasi Krisis dari Serambi Masjid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
15. Melangkah Karena Dipaksa Sejarah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

16. Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan (Bandung: Mizan, 1998)
17. Membangun Politik Adiluhung: Membumikan Tauhid Sosial, Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998)
18. Membangun Kekuatan di Atas Keberagaman (Yogyakarta: Pustaka SM, 1998)
19. Suara Amien rais, Suara Rakyat (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)
20. Amien Rais Sang Demokrat (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)
21. Amien rais Menjawab Isu-isu Politik Kontroversialnya (Bandung: Mizan, 1999)
22. Melawan Arus: Pemikiran dan Langkah Politik Amien rais (Jakarta: Serambi, 1999).

Lampiran 4

DATA PRIBADI

Nama : Haryanto Kurniawan
Tempat Tgl. Lahir : Magelang, 08 Agustus 1983
Alamat : Bakalan, Sawangan, Magelang 56481
Orang Tua : Bp. Iswadi M. S – Ibu Asyiyah
Agama : Islam

Pendidikan Formal :

1. TK ABA Ngentak, Sawangan (1989 – 1990)
2. MIM Sawangan (1990 – 1996)
3. SMP N I Sawangan (1996 – 1999)
4. SMA N I Tempel Yogyakarta (1999 – 2000)
5. MAN Magelang (2000 – 2002)
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003 – 2010)

Pengalaman Organisasi :

1. Bendahara OSIS MAN Magelang ; 2000 – 2001
2. Pengurus KARISMA (Keluarga Mahasiswa Magelang) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ; 2005 – 2006
3. Manajer Promosi dan Marketing “ AIR Management” ; 2007 – 2008